**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah bekerja sama dengan DPRD dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga kerjasama dalam bentuk kebijakan berupa rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka untuk menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata peraturan daerah inisiatif lebih banyak dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pihak eksekutif daripada DPRD sebagai pihak legislatif. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul “**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja DPRD dalam fungsi legislasi untuk menghasilkan peraturan daerah inisiatif, mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD, serta mengetahui upaya yang dilakukan DPRD untuk mengatasi faktor penghambat kinerja DPRD dalam menghasilkan peraturan daerah inisiatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan induktif yang mengutamakan kata-kata atau makna. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, kinerja DPRD dalam menghasilkan peraturan daerah inisiatif belum optimal. Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu DPRD sebagai lembaga legislatif belum mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif, peraturan daerah yang dihasilkan belum mampu mewakili kepentingan masyarakat umum, serta kurangnya inisiatif dari anggota DPRD. Adapun upaya yang dilakukan adalah pengembangan SDM anggota DPRD melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), mengadakan studi banding ke daerah lainnya, dan kerjasama dengan pihak eksekutif.

Kata kunci : Kinerja, Inisiatif, Fungsi Legislasi

***ABSTRACT***

 *Based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government that the Head of Region cooperates with DPRD in the affairs of local government administration. So that cooperation in the form of policy in the form of draft of regional regulation comes from DPRD and Head of Region (Governor, Regent / Mayor) in order to determine the direction of development and governance in region and realize prosperity of society.*

 *However, in the implementation of East Nusa Tenggara Province, there were more regional initiatives from the East Nusa Tenggara provincial government as the executive than the DPRD as the legislative party. This is what lies behind the author to take the title* ***"PERFORMANCE OF REPRESENTATIVE PEOPLE'S REPRESENTATIVES IN PRODUCING INITIATIVE REGULATION IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE".***

 *The purpose of this research is to know the performance of DPRD in legislative function to produce local regulation of initiative, to know factors influencing DPRD performance, and to know the effort made by DPRD to overcome the inhibiting factor of DPRD's performance in generating local regulation of initiative in East Nusa Tenggara Province.*

 *This research uses descriptive qualitative research method, with an inductive approach that prioritizes words or meaning. Data collection techniques are interview techniques, observation and documentation.*

 *Based on the research that has been done the author, the performance of DPRD in generating local regulations initiatives not yet optimal. Factors affecting the performance of the DPRD as a legislative body have not optimized the function of legislation in the formation of local regulations initiatives, local regulations generated have not been able to represent the interests of the general public, as well as lack of initiative from members of parliament. The efforts undertaken are the development of human resources of DPRD members through education and training (training), conducting comparative studies to other regions, and cooperation with the executive.*

*Keywords : Perfomance, initiative, legislation function*